

PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANDUNG

DOKUMEN RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

KECAMATAN BANJARAN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN
Jl. Alun –alun Selatan No. 222 / 215 Banjaran 40377
E-mail : kecbanjaran1@gmail.com Facebook : kecbanjaran1@gmail.com
Telp. (022) 5940003 – Fax 5940007

KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : LB.01.01 / Kep.12 – Kec/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2023

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , terkait dengan kewajiban setiap SKPD untuk membuat Rencana Kerja Perubahan sebagai acuan perencanaan kegiatan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) ke depan, maka untuk penyusunannya perlu dilaksanakan oleh Tim penyusunan Rencana Kerja Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Banjaran Kabupaten Bandung tentang Penyusunan dan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

18 Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2021-2026

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 dengan dasar dari Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2021-2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan penyempurnaan/ perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Banjaran
Pada Tanggal : Mei 2022

CAMAT BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KEC. BANJARAN

Drs. H. IKA NUGRAHA
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : LB.01.01 / Kep.12– Kec/2022

TANGGAL : Mei 2022

TENTANG : Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

Penanggungjawab	:	Camat Banjaran
Ketua Tim		Sekretaris Kecamatan Banjaran
Sekretaris	:	Kasubag Program dan Keuangan
Tim Pelaksana	:	1. Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban
	:	2. Kepala Seksi Pemerintahan
	:	3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	:	4. Kepala Seksi Sosial Budaya
		5. Kepala Seksi Pembangunan
	:	6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. BANJARAN BANDUNG

Drs. H. IKA NUGRAHA
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2023 dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Tahun 2023 merupakan salah - satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023.

Rancangan RENJA Kecamatan Banjaran Tahun 2023 disusun dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyusunannya.

Rancangan RENJA Kecamatan Banjaran Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banjaran Tahun 2021-2026 Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran pada Tahun 2023.

Banjaran, 29 Juli 2022
CAMAT BANJARAN



Drs. H. IKA NUGRAHA,
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1 Pengertian 1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen 3

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.3.1 Maksud 7

1.3.2 Tujuan 7

1.4. Sistematika 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 20

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan; 28

2.3.3 Peluang dan Tantangan 28

2.3.4 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 41

3.2. Program dan Kegiatan 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 52

BAB V PENUTUP 63

5.1. Catatan Penting 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Perangkat Daerah. Renja berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan perangkat daerah sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra serta mengacu pada RPJMD. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi daerah diatasnya seperti RKPD, Renstra dan RPJMD. Renja menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun yang direncanakan. Pada Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan

untuk beberapa program jika dibandingkan dengan Renja tahun-tahun sebelumnya untuk program yang sama, terdapat nama- nama kegiatan baru yang merupakan hasil pemetaan/penggabungan beberapa kegiatan sehingga jumlah kegiatan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan pada Renja tahun-tahun sebelumnya. Denganpemetaan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaksanaanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan ranwal Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya juga harus memperlihatkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L terkait.

Dalam rangka penyusunan ranwal Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan persiapan penyusunan; penyusunan Rancangan Akhir; penyusunan rancangan; pelaksanaan

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan penutup.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Akhir RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran, dalam hal ini RKA Perangkat Daerah, adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Dalam pendekatan ini pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja sehingga diharapkan akan menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dengan kinerja yang ingin dicapai. Untuk menunjukkan keterkaitan tersebut, pendekatan PBK mensyaratkan adanya indikator kinerja yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja. Khusus untuk lingkup Pemerintahan Daerah, diharapkan pengelolaan dan pengukuran kinerja di setiap Perangkat Daerah menggunakan sistem manajemen kinerja yang dituangkan dalam sebuah Penetapan Kinerja antara Kepala Daerah dan Camat.

Di samping itu, prinsip utama dalam penerapan PBK ini adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola satuan kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Kecamatan Banjaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Banjaran yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen- dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dengan dokumen manajemen berbasis kinerja. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

Sistem Perencanaan merupakan kerangka perencanaan pembangunan meliputi yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD.

Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 Kecamatan Banjaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025(Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung
23. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Kabupaten Bandung dalam Rencana Strategis Kecamatan Banjaran jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis Kabupaten Bandung dengan Pelayanan Kecamatan Banjaran, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Kecamatan Banjaran;
3. Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran kedalam Rencana Kinerja Tahunan;
4. Sebagai guide line bagi Kecamatan Banjaran dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun 2023;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanan Kecamatan Banjaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 - 2026;

2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2023;
3. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kecamatan Banjaran;
4. Menjadi pedoman Kecamatan Banjaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Banjaran, agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran Tahun Lalu

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjaran tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas / fungsi, review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan penelaahan usulan program/kegiatan

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

Membahas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banjaran serta Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Membahas tentang rencana kerja pada Tahun 2023 serta pendanaan yang disediakan untuk menjalankan rencana kerja tersebut

Bab V Penutup.

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA
DAN CAPAIAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, evaluasi terhadap Pelaksanaan RenjaTahun sebelumnya adalah Tahun 2021 dikarenakan pada saat penyusunan Renja Tahun 2023, tahun berjalan adalah Tahun 2022.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2022 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2016- 2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2017, 2018 dan 2019. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjaran. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra KecamatanKecamatan Banjaran Tahun 2016-2021.Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dankegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2016-2021. Dengandemikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadiselama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun padatahun 2021.

Secara umum Kecamatan Banjaran telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2021 adalah tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan. dari 2 (Du) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indicator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) yang sejkaligus sebagai Perjanjian Kinerja pada Tahun2021 Pada Tahun 2021 Kecamatan Banjaran melaksanakan 5 (Lima) program dengan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan didalamnya, Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 berjalan ditengah adanya pandemic Covid – 19 sehingga terjadi adanya kebijakan refocusing terhadap pagu anggaran, dan dari Refiocing tersebut

berdampak terhadap adanya pengurangan anggaran dan selain terdapat adanya beberakali perubahan yang berdampak terhadap anggaran yang disediakan sebesar Rp. 653,1967,746.00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 99,73% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 89,47 % atau Rp. 584,386,712.00 Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka realisasi program/kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 telah berhasil memberikan realisasi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target yang ditentukan, dengan demikian tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisai program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

      a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 7.570.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 7.259.100,00; Kinerja Anggaran : 95.89%; Rencana Output : Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja (2 Dokumen) Realisasi Output : Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja (2 Dokumen): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Capaian Kinerja

      b) Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 14.160.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 10.409.000,00; Kinerja Anggaran : 73,51%; Rencana Output : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah (4 Laporan / Dokumen) Realisasi Output : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah (4 Laporan / Dokumen): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pelaksanaan Admisnitrasi Keuangan

c) Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 34.600.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 33.089.800,00 Kinerja Anggaran : 95,64%; Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran pakaian dinas Pegawai

d) Kegiatan Adminsitrasi umum Perangkat Daerah ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 105.721.246,00 Realisasi Anggaran : Rp. 81.767.613,00 Kinerja Anggaran : 77,34% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Kegiatan Umum Perangkat Daerah

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 46.773.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 46.164.800,00 Kinerja Anggaran : 98,70% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pengadaan Barang Milik Daerah

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 222.000.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 210.313.849,00 Kinerja Anggaran : 94,74% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Jasa Penunjang Kantor

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 118.466.500,00 Realisasi Anggaran : Rp. 103.422.000,00 Kinerja Anggaran : 87,30% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 8.240.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 8.172.000,00 Kinerja Anggaran : 99,17% Rencana

Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Kegiatan Pelayanan Publik

c. Program Pemberdayaan Masyarkat Desa Dan Kelurahan

a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 8.240.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 8.172.000,00 Kinerja Anggaran : 99,17% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan MAsyarakat
b) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ; Lokasi : Kecamatan Banjaran; Jumlah Anggaran : Rp. 16.690.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 16.250.000,00 Kinerja Anggaran : 97,36% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

d. Program Kordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a) Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah; Jumlah Anggaran : Rp. 14.200.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 14.146.400 Kinerja Anggaran : 99,62% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; Jumlah Anggaran : Rp. 20.030.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 10.505.000,00 Kinerja Anggaran : 52.45% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; Jumlah Anggaran : Rp. 36.506.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 34.715.150,00 Kinerja Anggaran : 95.09% Rencana Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel) Realisasi Output : Jumlah Sarana Prasarana disiplin pegawai (33 Stel): Kinerja Output : 100%; Keterangan: Pembayaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

Kecamatan Banjaran

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Desember Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Unit Perangkat Daerah PeanggngJawab
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	K	K	K	K	K	
1	3	4	5	6	7	8	9=(6+8)	10=(9/5)*100	11
7.01	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**								Kec Banjaran
7.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**							Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	25	20	5 Dok	5	25	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		-	-			-		Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji ASN	60	48	12 Bulan	12	60	100,00	Kec Banjaran

7.01 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK	10	8	2	Dok	2	10	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	20	16	4	Dok	4	20	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	20	16	4	Dok	4	20	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan)	165	132	33	Stel	33	165	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang- undangan	15	12	3	Keg	3	15	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	25	20	5	jenis	5	25	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli	220	176	44	Jenis	35	211	95,91	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1.900	1.520	380	Box	300	1.820	95,79	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	25	20	5	Jenis	5	25	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli	25	20	5	Jenis	1	21	84,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	325	260	65	OH	55	315	96,92	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	15	12	3	Jenis	3	15	100,00	Kec Banjaran

7.01 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	45	36	9	Jenis	9	45	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	60	48	12	Bulan	12	60	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Tenaga Harian Lepas	60	48	12	Bulan	12	60	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25	20	5	Unit	5	25	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang harus dipelihara	25	20	5	Jenis	2	22	88,00	Kec Banjaran
7.01 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	4	1	Gedung	1	5	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 02 . 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 02 . 2.04 . 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15	12	1	Kegiatan	1	13	86,67	Kec Banjaran
7.01 . 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 03 . 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		-	-				-		Kec Banjaran
7.01 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	12	1	Kegiatan	1	13	86,67	Kec Banjaran

7.01 . 03 . 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		-	-			-		Kec Banjaran
7.01 . 03 . 2.03 . 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15	12	2 Kegiatan	2	14	93,33	Kec Banjaran
7.01 . 04	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		-	-			-		Kec Banjaran
7.01 . 04 . 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		-	-			-		Kec Banjaran
7.01 . 04 . 2.02 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah 'Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	4	1 Kegiatan	1	5	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		-	-			-		Kec Banjaran
7.01 . 05 . 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		-	-			-		Kec Banjaran
7.01 . 05 . 2.01 . 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN	10	8	2 Kegiatan	1	9	90,00	Kec Banjaran
7.01 . 06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		-	-			-		Kec Banjaran
7.01 . 06 . 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		-	-			-		Kec Banjaran

7.01 . 06 . 2.01 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	12	1	Kegiatan	1	13	86,67	Kec Banjaran
7.01 . 06 . 2.01 . 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	8	2	Kegiatan	2	10	100,00	Kec Banjaran
7.01 . 06 . 2.01 . 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15	12	1	Kegiatan	1	13	86,67	Kec Banjaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Banjaran merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Banjaran sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Kecamatan Banjaran untuk Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Banjaran Nomor : 141.1/Kep16.1/Kec/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Banjaran sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016- 2021 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banjaran. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Banjaran tersaji dalam table 2.2 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISA
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Indeks Kepuasan Mayarakat	-	-	80	81	82	-	81.06	81.54	80,31	-	Turun
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	-	-	(B)	(B)	(B)	-	(B)	(B)	(B)	-	Naik
				65	65	66	-	64.86	65.28	66.33	-	

3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	-	-	92	93	94	-	93.67	94.83	94.73	-	Naik

Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja Sasaran “Indeks Kepuasan Mayarakat” Target Tahun 2019 dapat tercapai 80%,Tahun 2019 sampai dengan semester II tercapai 81,06%, proyeksi Tahun 2021dan 2022 diperkirakan dapat tercapai 100%, sehingga diperkirakan pada akhir periode Renstra Tahun 2021 dapat tercapai 100%.
b. Capaian kinerja Sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi” Target Tahun 2019 dapat tercapai 65%, Tahun 2019 sampai dengan semester II tercapai 64,86%, proyeksi Tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan tercapai 100%, sehingga diperkirakan pada akhir periode Renstra Tahun 2021 akan tercapai 100%. Capaian tersebut didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan danProgram Penyusunan Data Dasar Pembangunan.
c. Capaian kinerja Sasaran “Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik” Target Tahun 2019 dapat tercapai 92%,Tahun 2019 sampai dengan semester II tercapai 81,06%, proyeksi Tahun 2021 dan 2022 diperkirakan dapat tercapai 100%, sehingga diperkirakan pada akhir periode Renstra Tahun 2021 dapat tercapai 100%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Huruf J Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, telah dibentuk Kecamatan. Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kecamatan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan Kecamatan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di lingkungan Kecamatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, seksi, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing. Camat baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Perangkat Daerah/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Kedudukan kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Banjaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya
b. Penyelenggaraan pengendalian, koordinasi, integrase, singkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas fungsinya yang di tunjang dengan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban ummum, pembangunan dan social budaya.
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya dan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat.
d. Mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh UPT dan oleh unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya..
e. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Banjaran Kabupaten bandung terdiri atas :

a. Camat
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pembangunan
g. Seksi Sosial Budaya
h. Jabatan Fungsional.

1. **Camat mempunyai tugas pokok** memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:
   a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
2. **Sekretaris mempunyai tugas pokok** merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan juga mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
   b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
   c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
   d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

3. **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok** menyusun dan melaksanakan rencana program dan melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan;
   b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
   c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
   d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
4. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok** menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah tangga kedinasan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya juga menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
   b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, kebutuhan rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

5. **Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
6. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
7. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

8. **Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.
9. **Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya;
   c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya;
   d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya;
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

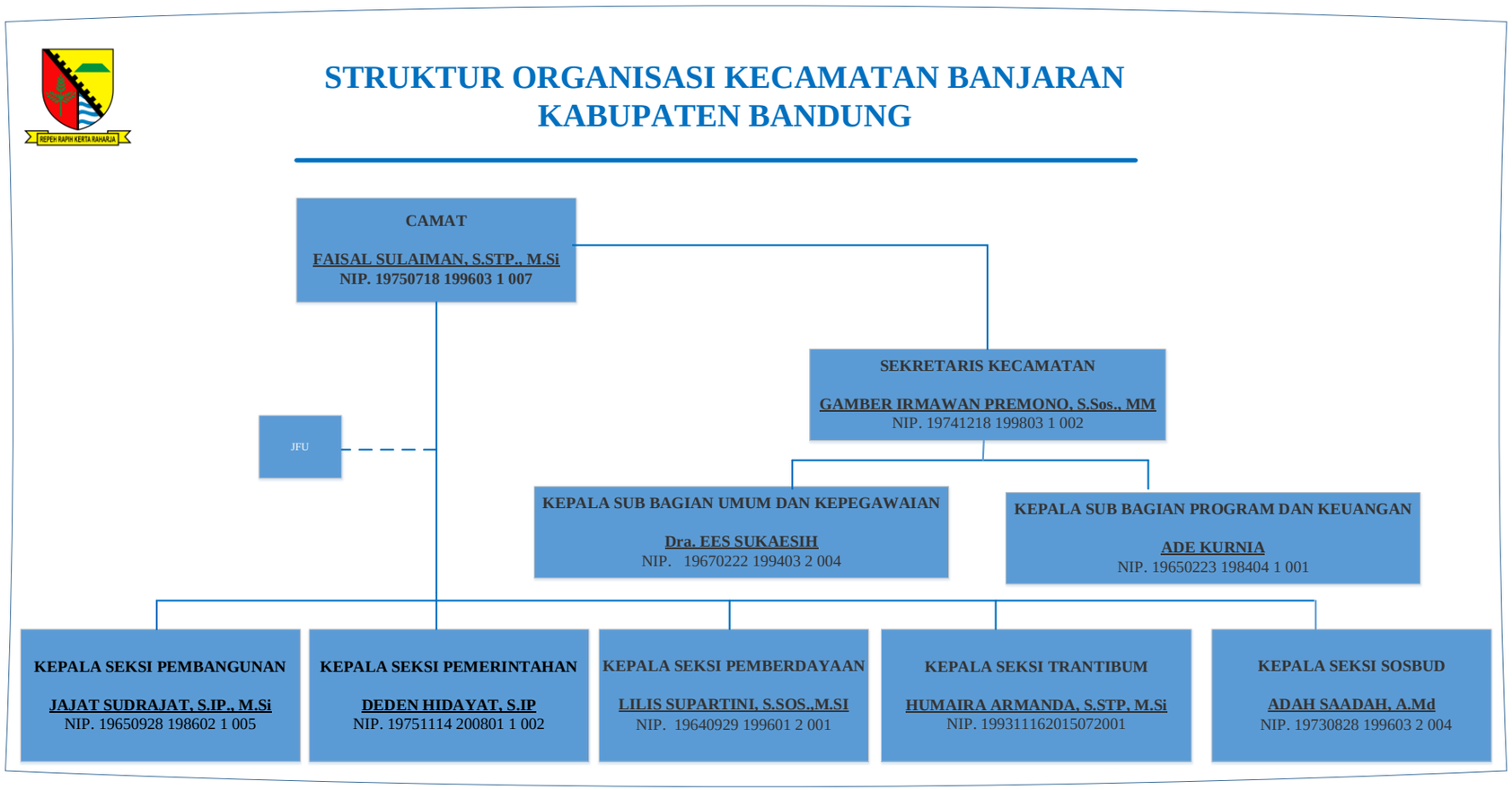
Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya, mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANJARAN

KABUPATEN BANDUNG



2.3.2 Permasalahan dan Hambatan;

Faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Banjaran ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya kordinasi antar sektoral di Tingkat Kecamatan yang diharapkan dapat mempelancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght*, *Weaknes,Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal
    a. Faktor Kekuatan (Strong)
        1) Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikanmemadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok danfungsinya.
        2) Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
        3) Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;
        4) Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan;
        5) Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugaspokok dan fungsi Kecamatan Banjaran.
    b. Faktor Kelemahan (Weakness)
        1) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yangmemiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya;
        2) Perkembangan tehnologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada;
        3) Kurangnya kapasitas aparatur kecamatan untuk pelayanan publik di

tingkat kecamatan;

4) Sarana parasarana untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) kurang memadai;
5) Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
6) Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
7) Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
8) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
9) Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
10) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan tidak merata di semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
11) Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1) Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yanag berpartisipatif.
2) Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjaran
3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berparkarsa seluas-luanya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4) Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan jugadengan para pemangku kepentingan;
5) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan ole Kecamatan Banjaran;
6) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap

pegawai;

7) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1) Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
3) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi;
4) Adanya keleluasaan partisipasi publik menyebabkan perencanaan pembangunan cenderung kurang profesional;
5) Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan;
6) Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskoordinasi;
7) Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit diatur;
8) Adanya ketergantungan terhadap dunia maya.

2.3.4 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Mendasarkan permasalahan pembangunan pada Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Administrasi Pemerintahan, maka isu strategis pembangunan kabupaten Bandung yang kemungkinan akan dihadapi Kecamatan Banjaran dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat pada Tahun 2020 dirumuskan sebagaiberikut :

1. Belum optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi danpelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju *good governance;*
3. Belum optimalnya gerakan revolusi mental meliputi integritas, budayakerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
4. Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingat kecamatan;
5. Belum optimalnya kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa;
6. Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camatuntuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan.

Isu – isu dan permasalahan tersebut di atas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran sebagai berikut :

1. Perlunya Optimalisasi fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Perlunya memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);
3. Perlunya meningkatkan integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
4. Perlunya mengupayakan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja;
5. Perlunya peningkatan kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan dan desa;
6. Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camatuntuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;
7. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dievaluasi untuk ditingkatkan kembali baik sarana dan prasarana dan yang lebih sangat vital sumber daya manusianya;
8. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
9. Membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat;
10. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan pegawai yang sesuaidengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengambil atau memutuskan kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat;
11. Perlunya peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Penyerapan aspirasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalamperencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
13. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana;

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);
3. Keseimbangan antara beban kerja dan ketersediaan sumber dayamanusia;
4. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Banjaran;
5. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran;
6. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran;
7. Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien.
8. Kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa yang memadai;
9. Pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat untuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;
10. Integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
11. Sarana dan prasarana yang memadai;
12. Inovasi, kreatifitas, pemanfaatan teknologi;
13. Kondisi dan Situasi yang kondusif.

Kecamatan Banjaran dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siapsudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknyaselalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuanpembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahanKecamatan Banjaran menuju *good goverance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Membandingkan Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rancangan Akhir RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut. Program dan kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD tersebut adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 2.4.1.

Tabel T-C31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kecamatan Banjaran Tahun 2023

Kode Rekening						Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Selisih (+/-)	Catatan Penting
						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)		
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**0**	**0**	**0**	**KECAMATAN**				**KECAMATAN**					
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**68 Point**	**4.210.757.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**68 Point**	**4.831.452.000**	**620.695.000**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**15.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**15.000.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.000.000	-	

						Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.729.357.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.350.052.000**	**620.695.000**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang / Bulan	3.720.357.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang / Bulan	4.341.052.000	**620.695.000**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.000.000	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.000.000	**-**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**90%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**90%**	**-**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	-	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-Orang	-	**-**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**76.700.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**76.700.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.000.000	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25.000.000	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	5.000.000	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	**-**	

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	1.500.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	17.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	17.700.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	8.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	8.500.000	-	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**61.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**61.000.000**	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	41.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	41.000.000	-	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**253.900.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**253.900.000**	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	3.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.900.000	-	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang yang terpelihara**	**100%**	**74.800.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang yang terpelihara**	**100%**	**74.800.000**	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	45.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.000.000	-	

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.800.000	-	
						Jumlah 1			**4.210.757.000**	**Jumlah 1**			**4.831.452.000**	**620.695.000**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**84 Point**	**12.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**84 Point**	**12.000.000**	**-**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**2,03**	**0**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Presentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**12.000.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Presentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**12.000.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000	-	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**2,04**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**-**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**-**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-Laporan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-Laporan	-	-	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**29.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**29.000.000**	**-**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**2,01**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**8.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**8.000.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	8.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	8.000.000	-	

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**2,03**	**0**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**21.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**21.000.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	3	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	2 Lembaga	21.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	2 Lembaga	21.000.000	-	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100,0%**	**18.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100,0%**	**18.000.000**	**-**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**4**	**2,02**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	100%	**18.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	100%	**18.000.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18.000.000	-	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**35.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**35.000.000**	**-**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**5**	**2,01**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**35.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**35.000.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	5	2,01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	35.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	35.000.000	-	

						Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**47.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**47.000.000**	**-**	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**6**	**2,01**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**100%**	**47.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**100%**	**47.000.000**	**-**	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	17.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	17.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Dokumen	20.000.000	-	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	10.000.000	-	
						Jumlah 2			**141.000.000**	**Jumlah 2**			**141.000.000**	**-**	
						Jumlah Total			**4.351.757.000**	**Jumlah Total**			**4.972.452.000**	**620.695.000**	- 620.695.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan.

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Adapaun usulan Musrenbang sebagai berikut

1. Usulan dalam Daftar Skala Prioritas berjumlah : 465 Usulan
2. Usulan Yang telah disetujui dalam forum PD : 116 Usulan

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Republk Indonesia, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 5 (lima) Peioritas Nasional (PN) yakni :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan Nasional dan kesuksesan Pemilu

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Pembentukan Kecamatan diatur oleh Pasal 221 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat diatur oleh Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.580-ADPEM/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat. Kecamatan merupakan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati (Perda 7/01 Ps 121 ayat 1).

Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah tidak menyebutkan dimulai dari Visi dan misi Perangkat Daerah, hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 111 mengenai penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, perencanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Banjaran merujuk langsung kepada Visi Bupati dan Misi nomor 4 melaui 3 (Tiga) sasaran RPJMD dengan 5 (lima) prioritas pembangunan.

Visi :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"

Misi Nomor 4 :

"Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan"

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Bandung dan Misi Nomor 4, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran Tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualiatas Tata Kelola Pemerintahan Desa

3.2. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik

meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Banjaran Utara diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pelayanan Masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

   Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Banjaran Tahun 2022 adalah 6 (Enam) program dengan 13 (Tiga belas) kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan didalamnya.

2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

   Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Banjaran sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Banjaran, yang meliputi semua Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Banjaran dan juga Kantor Kecamatan Banjaran sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di Wilayah Kabupaten Bandung.

i. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

   Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.683.401.851 (Empat Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh TIga Juta Empat Ratus Seribu Delpan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

d. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rekapitulasi Program/Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah – Bidang Tugas-Tugas Camat beserta kebutuhan dana/pagu indikatif tersaji dalam Tabel 3.1

TABEL 3.1
PROGRAM KEGIATAN RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening						Rancangan Akhir RKPD		
						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif (Rp.000)
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**0**	**0**	**0**	**KECAMATAN**		
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**4.831.452.000**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.000.000

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.350.052.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.341.052.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**-**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**76.700.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.700.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**61.000.000**

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41.000.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**253.900.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	235.900.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang yang terpelihara**	**74.800.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.800.000

							yang Dipelihara/Direhabilitasi	
						Jumlah 1		**4.831.452.000**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**12.000.000**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**2,03**	**0**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Presentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**12.000.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.000.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**2,04**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**29.000.000**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**2,01**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**8.000.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.000

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**2,03**	**0**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**21.000.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	3	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	21.000.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**18.000.000**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**4**	**2,02**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**18.000.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.000.000
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**35.000.000**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**5**	**2,01**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**35.000.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	5	2,01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.000.000

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**47.000.000**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**6**	**2,01**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**47.000.000**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000
						Jumlah 2		**141.000.000**
						Jumlah Total		**4.972.452.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Banjaran Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.1

Tabel T.C33
Rumusan Rancangan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakira Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**				**KECAMATAN**			**5.212.452.000**					**4.398.857.000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	67 point	**4.913.827.000**				67 point	**4.214.857.000**	
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	**65.000.000**				100 %	**15.000.000**	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	53.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN

7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	**4.350.052.000**				100 %	**3.729.357.000**	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bul	4,341,052,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Banjaran	20 Orang/Bul	3,720,357,000	KECAMATAN BANJARAN

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	4 Laporan	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	4 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	4 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100 %	**15.000.000**				100 %	**4.100.000**	
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD Kantor Kecamatan Banjaran	1 Laporan	4.100.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	**72.243.000**				100 %	**53.500.000**	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	5 Paket	10.000.000	KECAMATAN BANJARAN

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	25.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	13 Paket	15.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	5.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	9 Paket	5.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	2 Paket	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.168.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	3 Paket	5.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.075.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan		Kantor Kecamatan Banjaran	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.500.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	1 Laporan	8.500.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	**61.000.000**				100 %	**51.000.000**	

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	2 Unit	10.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	41.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	13 Unit	41.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	**275.732.000**				100 %	**213.900.000**	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.832.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	235.900.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Kecamatan Banjaran	1 Laporan	195.900.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 %	**74.800.000**				100 %	**128.000.000**	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	45.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Barang Kantor Kecamatan Banjaran	5 Unit	45.000.000	KECAMATAN BANJARAN

7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	4.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Barang Kantor Kecamatan Banjaran	15 Unit	8.900.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.800.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Barang Kantor Kecamatan Banjaran	1 Unit	74.100.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Point	**43.625.000**				82 Point	**12.000.000**	
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	**12.000.000**				100 %	**12.000.000**	
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se Kecamatan Banjaran	1 Laporan	12.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**02**	2,04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	**31.625.000**				100 %	**0**	
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	31.625.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Wil Kecamatan Banjaran	1 Laporan	0	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	**67.000.000**				100 %	**34.000.000**	

7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	**31.190.000**				100 %	**11.000.000**	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se Kecamatan Banjaran	5 Lembaga	8.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.190.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se Kecamatan Banjaran	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**03**	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %	**35.810.000**				100 %	**23.000.000**	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	29.900.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PKK Desa Se Kecamatan Banjaran	2 Lembaga	18.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	03	2,03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	5 Unit	910.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PKK Desa Se Kecamatan Banjaran	5 Unit	0	KECAMATAN BANJARAN
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PKK Desa Se Kecamatan Banjaran	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	**30.000.000**				100 %	**18.000.000**	

7	**01**	**04**	2,01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	**16.850.000**				100 %	**0**	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.800.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wilayah Kecamatan Banjaran	1 Laporan	0	KECAMATAN BANJARAN
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	9.050.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wilayah Kecamatan Banjaran	1 Laporan	0	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**04**	2,02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	**13.150.000**				100 %	**18.000.000**	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.150.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wilayah Kecamatan Banjaran	1 Laporan	18.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	**98.000.000**				100 %	**70.000.000**	

7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	**98.000.000**				100 %	**70.000.000**	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	30.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se kecamatan Banjaran	100 Orang	15.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	25.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se kecamatan Banjaran	100 Orang	15.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	43.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se kecamatan Banjaran	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	**60.000.000**				100 %	**50.000.000**	
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	**60.000.000**				100 %	**50.000.000**	

7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	13.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se Kecamatan Banjaran	4 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	0	KECAMATAN BANJARAN
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	19.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	0	KECAMATAN BANJARAN
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa Se Kecamatan Banjaran	1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN BANJARAN
							TOTAL	**5.212.452.000**					**4.398.857.000**	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Banjaran dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran serta sebagai acuan dalam menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Kecamatan Banjaran Tahun 2023. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Banjaran di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan- karyawati Kecamatan Banjaran serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Sebagai Berikut :

1. Kecamatan Banjaran berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023;
2. Kecamatan Banjaran berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Banjaran Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Banjaran. Renja Kecamatan Banjaran juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Banjaran ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung.

Banjaran, 29 Juli 2022
CAMAT BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KEC. BANJARAN

Drs. H. IKA NUGRAHA,
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

Form E.70

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan Rancangan Akhir RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.		√		
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			

11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Banjaran, 29 Juli 2022

CAMAT BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEC. BANJARAN

Drs. H. IKA NUGRAHA,

Pembina TK. I / IV b

NIP. 19650917 199403 1 005